

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS TERHADAP  
PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH  
(Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:  
Trisni Anggraini  
NIM. 06110244002

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
OKTOBER 2010**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah (Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)” ini telah disetujui untuk diujikan.

Yogyakarta, 06 September 2010

Pembimbing I

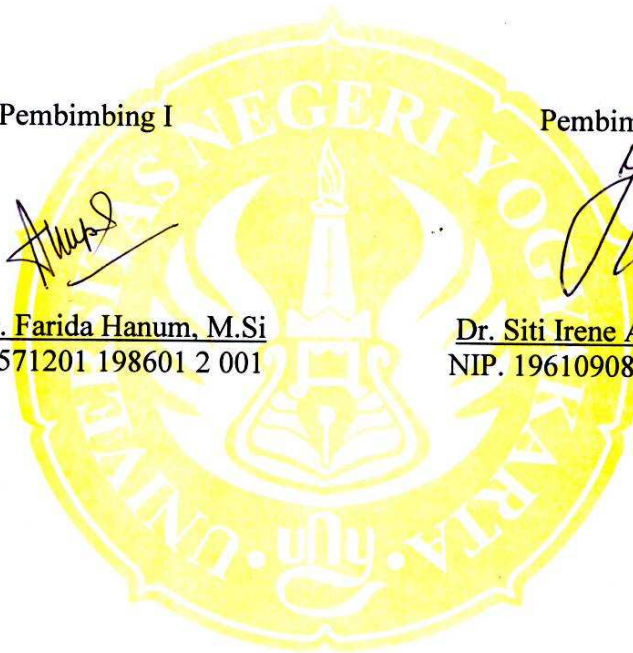


Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si  
NIP. 19571201 198601 2 001

Pembimbing II



Dr. Siti Irene Astuti D, M.Si  
NIP. 19610908 198901 2 001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Trisni Anggraini  
Nim : 06110244002  
Prodi : Kebijakan Pendidikan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Saya juga menyatakan bahwa tanda tangan dalam lembar pengesahan adalah asli. Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti yudisium satu tahun kemudian.

Yogyakarta, 06 September 2010  
Yang membuat pernyataan



Trisni Anggraini  
06110244002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah (Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 September 2010 dan dinyatakan lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Prof. Dr. Farida Hanum, M. Si	Ketua Penguji.		4/10 2010
Y.Ch.Nany. Sutarini, M. Si.	Sekretaris Penguji		4/10 2010
Prof. Dr. Yoyon Suryono	Penguji I		4/10 2010
Dr. Siti Irene Astuti DW, M. Si	Penguji II		4/10 2010


Yogyakarta, 14-10-2010

*Tres*



Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dean

  
Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum  
NIP.19550205 198103 1 004

## MOTTO

- ✿ Untuk menuju siang, malam butuh waktu pagi. Untuk menuju malam, siang butuh sore. Dalam hidup semua ada prosesnya. Selangkah demi selangkah. (Om)
  
- ✿ Nikmati saja proses takutmu, dinamika kekhawatiranmu, ambil resiko, berbuatlah meskipun kadang salah, keluarlah dari zona nyaman. Karena ketika kita tidak berani mengambil resiko, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. (Om)
  
- ✿ Menjadi orang penting itu baik, tapi bagi saya menjadi orang baik jauh lebih penting dan benar. (Om)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur skripsi saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan aku,
2. Adik-adikku semuanya,
3. Jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan Prodi Kebijakan Pendidikan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah (Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap)” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari, keberhasilan yang dapat diraih dalam penyusunan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak, maka penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan serta menyetujui proposal skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siti Irene Astuti D, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan juga pengarahan hingga terwujudnya proposal skripsi ini.
6. Segenap *stakeholder* pendidikan yang ada di SMP Negeri se-Kecamatan Kokap (SMP N 1 Kokap, SMP N 2 Kokap, dan SMP N 3 Kokap)
7. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta (Sutrisno Hadi, S.Pd dan Rully Anggraini) yang memberikan dorongan, dukungan dan doa selama menyelesaikan proposal ini, baik dari segi material maupun spiritual.
8. Rekan-rekan di Prodi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyusunan proposal ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 06 September 2010

Penulis



**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS**

**TERHADAP PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH**

**(Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)**

**Oleh**

**Trisni Anggraini**

**06110244002**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi BOS terhadap penurunan angka putus sekolah di SMP N se-kecamatan Kokap serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menurunkan angka putus sekolah di SMP N se-kecamatan Kokap.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah anak usia sekolah SMP yakni anak yang berusia 13-15 tahun yang telah mengalami putus sekolah serta *stakeholder* pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber penelitian. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan BOS sangat membantu masyarakat Kecamatan Kokap yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun hal ini tidak berdampak langsung terhadap penurunan angka putus sekolah karena selama kurang lebih 5 tahun berjalannya kebijakan BOS, jumlah angka putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap tidak mengalami penurunan. (2) faktor pendukung implementasi BOS terhadap penurunan angka putus sekolah adalah latar belakang ekonomi orang tua, sosialisasi BOS secara intens kepada masyarakat dari pemerintah dan sekolah serta animo masyarakat yang tinggi dalam menerima kebijakan BOS; (3) faktor penghambat implementasi BOS terhadap penurunan angka putus sekolah adalah rendahnya motivasi belajar anak, perilaku indisipliner anak, anak bekerja, latar belakang pendidikan orang tua, kondisi geografis daerah yang sulit, dampak kemajuan IPTEK, transmigrasi, adanya gangguan teman sebaya, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran serta kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

Kata kunci: implementasi, kebijakan BOS, angka putus sekolah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan .....	11
B. Kebijakan Pendidikan di era Otonomi Daerah (Desentralisasi Pendidikan).....	16 22
C. Kebijakan BOS.....	29
D. Kerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Tempat Penelitian .....	35

D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Deskripsi Kondisi Wilayah Kecamatan Kokap.....	41
2. Implementasi Kebijakan BOS dan Putus Sekolah.....	45
B. Pembahasan.....	51
1. Implementasi BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap.....	51
a) Manajemen BOS.....	51
b) Program BOS.....	56
c) Monitoring BOS.....	62
2. Problematika Kebijakan BOS dan Angka Putus Sekolah.....	65
3. Faktor Pendukung Implementasi BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap.....	72
4. Faktor Penghambat Implementasi BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM). Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan SDM secara optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan mulai dari dalam keluarga, hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Salah satu SDM yang dimaksud adalah generasi muda (*young generation*) sebagai kader pembangunan yang sifatnya masih potensial, perlu dibina dan dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan melalui lembaga pendidikan sekolah yang bermutu. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 th 2003 yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap warga negara. Seperti yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11 ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Namun, munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah sekaligus memunculkan kebijakan baru yaitu kebijakan desentralisasi pendidikan. Konsep desentralisasi merupakan suatu kerangka kewenangan kebijakan pengelolaan pendidikan yang menggeser paradigma sentralisasi semasa pemerintahan orde baru. Konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang dilimpahkan, dari suatu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada dibawahnya, atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi). Manfaat desentralisasi, sama dengan manfaat delegasi, yaitu melepaskan beban manajemen puncak, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja, dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah (Riant Nugroho, 2008: 27).

Desentralisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada pemberian kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu

pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi: a) peningkatan mutu; b) efisien keuangan; c) efisien administrasi; dan d) perluasan/pemerataan (Siti Irene Astuti 2009: 6). Akan tetapi, dalam konteks kebijakan yang bersifat desentralisasi memperlebar jurang perbedaan antara kemampuan daerah yang telah maju dengan daerah yang masih tertinggal sehingga menghambat pencapaian program pemerataan pendidikan. Dengan kondisi tiap daerah yang berbeda berakibat pada semakin lebarnya kesenjangan antara daerah yang telah maju dengan daerah-daerah yang masih tertinggal. Sehingga daerah-daerah yang tertinggal tersebut akan semakin sulit mengejar ketertinggalan mereka khususnya dalam hal akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.

Salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah anggaran pendidikan menjadi 20%. Dalam sejarah perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, hanya bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi anggarannya yaitu sebesar 20% dari anggaran dalam APBN/APBD. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah bertekad untuk memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar. Pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No.1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No.5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Selain itu, upaya lain dari pemerintah adalah melalui Depdiknas, menyalurkan dana bantuan dan kemudahan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dalam konteks ini pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dana BOS adalah pelaksanaan Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang direlokasikan di bidang Pendidikan sejak Tahun 2005. BOS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bersumber dari APBN.

Dana BOS diperuntukan khusus untuk siswa/i setingkat SD/ SLTP yang kurang mampu, sedang untuk siswa/i kurang mampu SMA atau setara akan diberikan beasiswa secara langsung dengan cara transfer tanpa perantara ke rekening siswa/i tersebut (kurang mampu / miskin). Penggunaan Dana BOS adalah untuk Belanja Barang/Jasa dan Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan Bantuan Siswa. Menurut salah satu dari surat edaran : Surat Edaran DepKeuRI/Dirjen Pajak No. SE-02/PJ./2006, segala pengeluaran tetap

dikenakan pajak PPH 21/ 22 / 23 dan juga Bea Meterai (Buku Panduan BOS 2009).

Dalam buku panduan BOS tahun 2009, dana BOS dikucurkan mulai tahun ajaran 2005/2006. Untuk tahun 2009 anggarannya senilai Rp 575.000/siswa/tahun untuk tingkat SMP/SMPLB/SMPT di kota dan Rp 570.000/siswa/tahun untuk tingkat SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten. Bantuan dana BOS diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.

Sampai saat ini, program BOS telah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Akan tetapi hasil dari kebijakan BOS tersebut belum nampak secara signifikan terutama dalam hal berkurangnya jumlah angka putus sekolah tingkat SMP N. Angka putus sekolah yang dimaksud oleh peneliti adalah jumlah siswa yang meninggalkan sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tingkat SMP N. Hal ini terjadi di daerah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang terlihat dari data tabel di bawah ini:



**Tabel. 1**  
**Tabel Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap**  
**Kabupaten Kulon Progo**

No.	Tahun Ajaran	Angka Putus Sekolah			Jumlah
		SMP N 1 Kokap	SMP N 2 Kokap	SMP N 3 Kokap	
1.	2005/2006	8	1	1	10
2.	2006/2007	2	12	3	17
3.	2007/2008	1	5	2	8
4.	2008/2009	1	2	2	5
5.	2009/2010	1	3	2	6

*Dokumen: SMP N 1, SMP N 2 dan SMP N 3 Kokap Kabupaten Kulon Progo.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama berlakunya kebijakan BOS yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, jumlah anak putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami perubahan secara signifikan. Apabila dilihat secara keseluruhan maka jumlah anak putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap ini cenderung turun naik.

**Tabel. 2**  
**Tabel Jumlah Angka Putus sekolah Berdasarkan Usia Sekolah**  
**se-Kecamatan Kokap kabupaten Kulon progo**

No.	Tahun Ajaran	Usia Sekolah yang Putus Sekolah			
		SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
1.	2006/2007	47	48	12	6
2.	2007/2008	47	48	12	6
3.	2008/2009	47	48	12	6

*Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*

Di tunjang oleh data yang bersumber dari profil kecamatan Kokap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama lima periode berjalannya kebijakan BOS, apabila dilihat dari usia anak maka jumlah anak putus sekolah di daerah Kecamatan Kokap masih cukup tinggi. Bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk itu, penelitian ini pun penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi kebijakan BOS terhadap penurunan jumlah angka putus sekolah tingkat SMP N di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini dilakukan khususnya pada SMP N yang ada di daerah Kecamatan Kokap dengan pertimbangan daerah Kecamatan Kokap merupakan daerah yang angka putus sekolahnya cukup tinggi. Meskipun kebijakan BOS telah berjalan selama 5 tahun, akan tetapi angka putus sekolah untuk tingkat SMP N di Kecamatan Kokap ini tidak mengalami perubahan yang berarti atau tidak terjadi perubahan yang signifikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih tingginya angka putus sekolah.
2. Belum maksimalnya pencapaian program WAJAR 9 Tahun.
3. Belum maksimalnya implementasi kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah.
4. Desentralisasi pendidikan berdampak pada semakin dalamnya jurang perbedaan antara daerah yang telah maju dengan daerah yang masih tertinggal.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi BOS dalam penurunan angka putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian di atas adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS terhadap penurunan angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implikasi implementasi kebijakan BOS terhadap pengurangan angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui factor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah konsep kajian tentang kebijakan pendidikan khususnya pada mata kuliah Dasar-Dasar Kebijakan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan data bagi pemerintah untuk menciptakan sebuah kebijakan baru dalam bidang pendidikan.
  - c. Sebagai tambahan informasi bagi dinas pendidikan terkait implementasi kebijakan BOS SMPN di Kecamatan Kokap.
  - d. Sebagai informasi tentang implementasi kebijakan BOS di sekolah.
2. Secara Praktis
  - a. Membantu dinas pendidikan mengetahui faktor-faktor penyebab putus sekolah bagi siswa SMPN yang ada di Kecamatan Kokap.
  - b. Membantu Dinas Pendidikan dalam analisis *outcome* program BOS dalam hal angka putus sekolah.
  - c. Sebagai syarat kelulusan program SI Prodi Kebijakan Pendidikan.
  - d. Sebagai media bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah

diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya di lapangan.

- e. Sebagai media pengabdian peneliti kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Kata kebijakan atau biasa disebut dengan *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981:7). Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan diartikan sebagai, “...*whatever government chooses to do or not to do*” (Solichin Abdul Wahab, 1997:4).

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988:66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah (dalam Bambang Supriyadi, diakses dari <http://massofa.wordpress.com>).

James E. Anderson memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Solichin Abdul Wahab, 1997:2)

Sedangkan kebijakan pendidikan sendiri dalam Ensiklopedia Wikipedia disebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan system pendidikan, yang tercakup di

dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan (Riant Nugroho, 2008:35,36,dan37).

Menurut H.A.R Tilaar dalam Kebijakan Pendidikan (2008:140), kebijakan pendidikan dijelaskan sebagai keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian kebijakan yang diungkapkan oleh para ilmuwan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan tertulis yang mencakup pertanyaan: *what* (apa), *why* (mengapa), *who* (siapa), *where* (di mana), dan *how* (bagaimana) yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Efektif tidaknya suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan sangat tergantung pada implementasinya. Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means*

*for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai *"getting the job done"* dan *"doing it"*. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan

Van Meter dan Van Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

*“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. “*

Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai



perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Solichin Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn mengajukan model mengenai proses

implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*).

Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber-sumber kebijakan,
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan ekonomi, social dan politik.

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi (Solichin Abdul Wahab, 1997: 78-79).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

## **B. Kebijakan Pendidikan di era Otonomi Daerah (Desentralisasi Pendidikan)**

Penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia telah dimulai semenjak masa penjajahan, dilanjutkan oleh rezim Orde Lama (1945-1965) kemudian dilanjutkan kembali oleh rezim Orde Baru (1966-1998). Dari rezim Orde lama sampai dengan rezim Orde Baru, kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sentralistik dimana kebijakan pendidikan terpusat pada pemerintah.

Reformasi pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah dewasa ini akan sangat menentukan sosok dan kinerja sistem pendidikan nasional di masa depan. Tujuan utama reformasi pendidikan adalah membangun suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih mantap dan lebih maju dengan seoptimal mungkin memberdayakan potensi daerah dan partisipasi masyarakat lokal.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih desentralistik dengan tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemerintah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif. Untuk propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa.

H.A.R. Tilaar dalam *Membenahi Pendidikan Nasional* (2002: 20) menyatakan bahwa ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah: a. pembangunan masyarakat demokrasi; b. pengembangan sosial kapital; dan c. peningkatan daya saing bangsa. Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan, meliputi: a) peningkatan mutu; b) efisiensi keuangan; c) efisiensi administrasi; d) perluasan/pemerataan pendidikan (Siti Irene Astuti 2009: 6).

Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi pendidikan merupakan sesuatu hal yang baru, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan kecermatan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif. Menurut Yahya A.

Muhaimin dalam “*Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*” (2001:xxxiv), ada beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam mengimplementasikan desentralisasi pendidikan, yaitu prioritas nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Salah satu hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam era otonomi daerah adalah prioritas nasional dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (WAJAR 9 Tahun). Setiap daerah memiliki kemampuan yang bervariasi untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan, padahal pelaksanaan program WAJAR 9 Tahun tersebut harus tetap menjadi prioritas pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia karena berimplikasi langsung pada pemerataan pendidikan.

Program Wajib Belajar 9 Tahun (WAJAR 9 Tahun) merupakan program dari Menteri Pendidikan Nasional Profesor Bambang Sudibyo yang dimulai pada tahun 1994 berupa sekolah gratis sampai lulus SMP khusus siswa yang sekolah di SD/SMP negeri kecuali sekolah yang sudah bertaraf Internasional agar para anak-anak penerus bangsa ini tidak bodoh dan buta huruf dan juga agar pendidikan di Indonesia menjadi bertambah maju. Indikator utama penuntasan WAJAR Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dari sisi jumlah siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan terhadap sekitar 1.9 juta anak usia 13 – 15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/ yang sederajat.

Penuntasan WAJAR Dikdas 9 Tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program nasional tersebut.

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah :

- a. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP, MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
- b. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
- c. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- e. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- f. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

Sasaran gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun ini adalah untuk :

1. Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13–15 tahun) yang belum belajar di SMP/MTs atau yang sederajat.
2. Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.
3. Anak putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.

Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, anak-anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti:

- a. SMP Negeri atau SMP Swasta Biasa
- b. SD-SMP Satu Atap
- c. SMP Terbuka
- d. MTs Negeri atau MTs Swasta atau sekolah lainnya yang sederajat
- e. Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah program nasional. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program itu perlu kerjasama yang menyeluruh antara:

1. Pemerintah Pusat (Menko Kesra, Mendiknas, Mendagri, Menkeu, Menpan/Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Mentan, Menhut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menperi, Menakertrans, Menhum

dan HAM, Menkominfo, Menneg Lingkungan Hidup, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal, Menneg Pemuda dan Olahraga, Menneg BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik)

2. Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi)
3. Pemerintah Kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota)
4. Pemerintah Kecamatan (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan)
5. Kelurahan

Di samping itu, masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkari, Dharma Pertiwi dan lainnya diharapkan tetap meningkatkan partisipasinya dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Namun, karena kemampuan daerah yang bervariasi, maka perbedaan akses pendidikan antara kabupaten dan kota di Indonesia yang sudah terjadi pada awal desentralisasi akan semakin melebar. Akibatnya, bila tidak ada dukungan khusus untuk daerah-daerah tertinggal dari propinsi dan pemerintah pusat, maka ketimpangan akses pendidikan antar daerah akan semakin besar dan tujuan pemerataan di bidang pendidikan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, guna menanggulangi permasalahan di atas, maka pada tahun 2005 pemerintah pun mencanangkan suatu kebijakan pendidikan baru yang dinamakan dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa dikenal dengan kebijakan BOS.



### **C. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Munculnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilatar belakangi oleh meningkatnya subsidi BBM yang harus dibayar oleh pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia pada tahun 2005 berdampak pada penurunan kemampuan daya beli masyarakat miskin, termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengakses pendidikan. Banyak siswa yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ditambah lagi adanya kebijakan otonomi daerah yang secara langsung ikut memunculkan kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak pada semakin sulitnya daerah-daerah tertinggal untuk mengejar kemampuan daerah-daerah yang lebih maju dalam hal akses pendidikan. Hal ini tentu saja menghambat upaya penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR 9 Tahun) dan tentu saja berdampak langsung pada sulitnya pencapaian pemerataan pendidikan.

Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat

undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program WAJAR 9 Tahun. Program BOS ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus, program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dalam surat edaran DepKeuRI/Dirjen Pajak No. SE-02/PJ/2006 penggunaan dana BOS yang digunakan untuk Belanja Barang/Jasa dan Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan Bantuan Siswa,

semuanya tetap dikenakan pajak PPH 21/ 22 / 23 dan juga Bea Meterai (Buku Panduan BOS tahun 2009).

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Akan tetapi, program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.

- f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- g. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- i. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- j. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- l. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- m. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- n. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- o. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- p. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- q. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

- r. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- s. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- t. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran Yang Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional
- u. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
- v. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku
- w. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
- x. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional

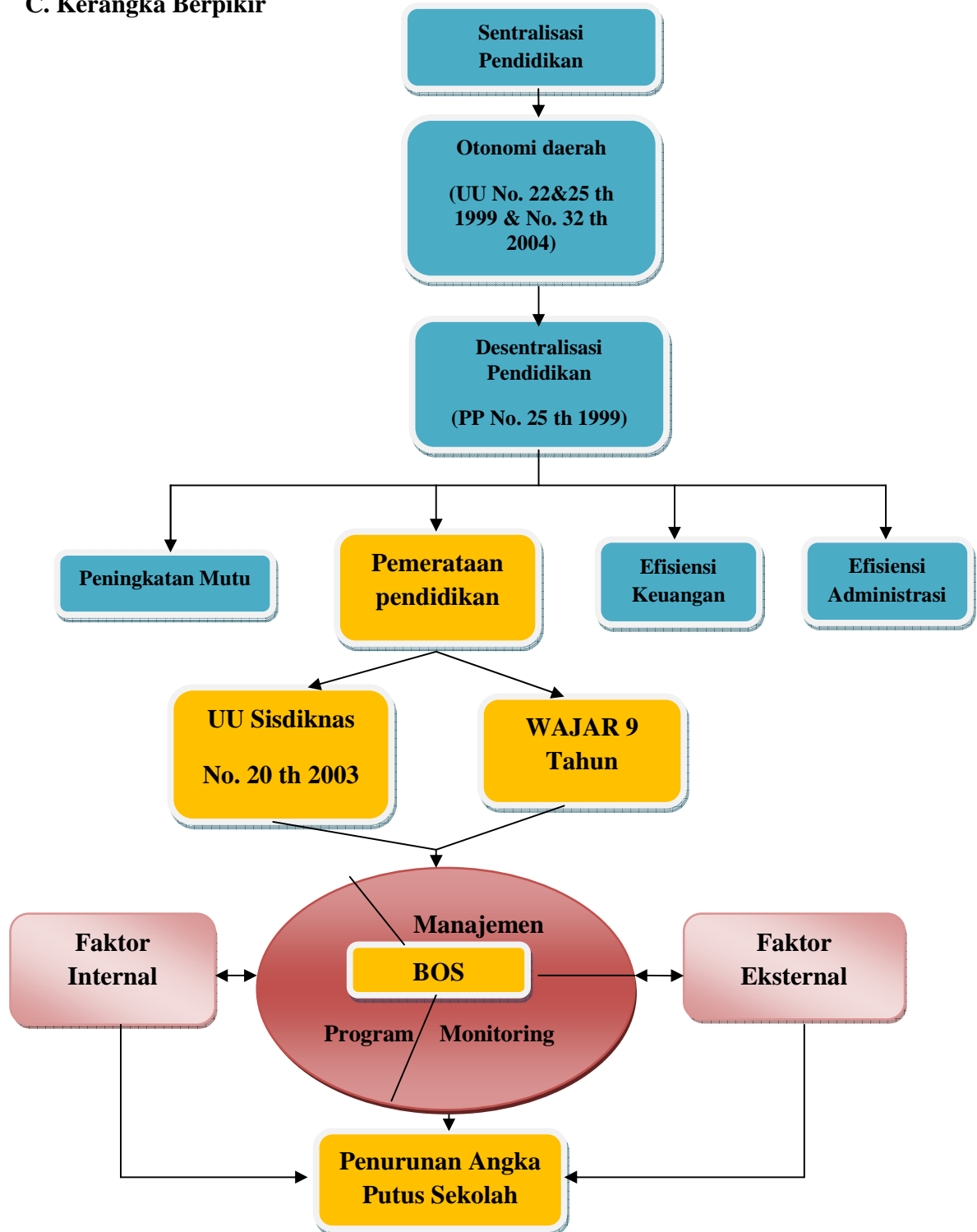
- y. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)
- z. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
- aa. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.

2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
3. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
4. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya.
5. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

### C. Kerangka Berpikir





Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program pendidikan nasional di Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan yang bersifat politik dari Pemerintah. Kebijakan politik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ditata dalam pola yang saling bergantian antara pola sentralistik dan desentralistik. Kebijakan pendidikan mengikuti perubahan dari kebijakan politik pemerintahan yang sentralistik dan desentralistik tersebut.

Munculnya UU No.22 dan 25 th 1999 mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah mengarahkan sektor pendidikan pada kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi pendidikan bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi keuangan dan efisiensi administrasi. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada tujuan desentralisasi pendidikan yakni pemerataan pendidikan. Dalam hal ini, pemerataan pendidikan dilihat melalui besar kecilnya angka putus sekolah dalam suatu daerah.

Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan maka pemerintah mencanangkan beberapa program yang saling bersinergi dengan harapan dapat mendukung pemerataan pendidikan. Adanya program WAJAR 9 Tahun, serta adanya UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 terutama pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1), mengisyaratkan pemerintah untuk wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya program BOS diharapkan dapat membantu memperkecil angka putus sekolah sekaligus berdampak pada pencapaian pemerataan pendidikan. Dalam implementasinya, kebijakan BOS dibagi ke dalam tiga bagian yaitu implementasi program BOS, manajemen BOS dan monitoring program BOS.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan tentunya dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam implementasi kebijakan BOS. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini lah yang akan memberikan pengaruhnya baik itu pengaruh positif maupun negative terhadap jalannya implementasi kebijakan BOS tersebut.

Untuk itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah implementasi kebijakan BOS turut serta serta memberikan perannya dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya.

Dari penjelasan kerangka berpikir di atas, muncul beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS terhadap penurunan angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?

2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BOS dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipakai karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Berdasarkan hal di atas ditunjang dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi yang dikumpulkan biasanya diperoleh dari sebagian populasi sebagai wakil populasi yang biasa disebut sampel. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan responden.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

## **B. Fokus Penelitian**

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, didalam penelitian ini tetap diperlukan fokus penelitian untuk membatasi bidang studi atau bidang penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap penurunan angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon progo kemudian faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan BOS tersebut terkait penurunan angka putus se

### C. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMP yang berstatus sekolah Negeri yang berada di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa:

1. Dilihat dari data, angka putus sekolah tiap tahun di Kecamatan Kokap setelah adanya program BOS tidak mengalami perubahan yang berarti.
2. Secara geografis, kondisi Kecamatan Kokap berupa daerah pegunungan dimana letak SMP Negeri nya saling berjauhan sehingga masyarakat cukup sulit untuk mengakses SMP Negeri
3. Pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut cukup mudah dijangkau oleh peneliti karena peneliti berdomisili di DIY.

### D. Populasi dan Sampel

Informan dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah yakni anak yang berusia 13-15 tahun serta *stakeholder* pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Metode penarikan *sample* adalah dengan *purposive sampling*, yakni penarikan *sample* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang apa yang diketahui. Responden yang dijadikan sampel merupakan orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Responden sebagai *key person* dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala UPTD Kokap
2. Kepala Sekolah serta guru SMP N 1 Kokap, SMP N 2 Kokap dan SMP N 3 Kokap.
3. Masyarakat sekitar daerah Kecamatan Kokap.
4. Siswa putus sekolah.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono (2007:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pelaksanaan pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan jalan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dan studi dokumenter, kemudian mencatat fenomena yang terjadi terkait implementasi kebijakan BOS terhadap penurunan angka putus sekolah serta factor-faktor pendukung

maupun penghambat lainnya terhadap implementasi kebijakan BOS tersebut.

## 2. Wawancara Mendalam (*Interview*)

Menurut Arikunto, (1998:132), wawancara sering disebut juga kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Dengan wawancara dapat diketahui ekspresi muka, gerak gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang utama. Untuk itu wawancara mendalam sangatlah penting dalam penelitian kualitatif. Metode mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.

## 3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1989:89) metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data secara keterangan-keterangan yang ada pada catatan, transkrip dan buku yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data sekunder yang tidak ditemukan di lapangan.



## **F. Tehnik Analisis Data**

Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model analisa ini terdapat 3 komponen analisa, yaitu: reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman. 1992), yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Reduksi data**

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar. Penyajian data tidak terpisahkan dari analisis justru penyajian data akan menentukan suatu analisa.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diversifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian yang kita miliki adalah angan-angan yang tidak jelas kebenarannya.

Telah dikemukakan tiga hal utama yang merupakan komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis (seperti pada gambar 3). Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif.

### **G. Keabsahan Data**

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan kemudian dicatat dalam kegiatan penelitian. Data tersebut harus diusahakan bukan hanya untuk kedalaman dan kemantapannya saja tetapi juga kebenarannya. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (dalam Moleong 2005:330).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode menekankan penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan lebih jelas diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapannya. Dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Kondisi Wilayah Kecamatan Kokap**

Kecamatan Kokap merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah tengah daerah kabupaten Kulon Progo propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kecamatan Kokap memiliki wilayah seluas 7.379,95 Ha atau sebesar 12,588% dari wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas diantara 11 kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan Kokap terdiri dari lima desa yaitu desa Hargo Mulyo yang memiliki luas daerah 1.520,97 Ha, Hargo Rejo memiliki luas daerah 1.543,45 Ha, Hargo Wilis memiliki luas daerah 1.547,84 Ha, Kalirejo memiliki luas daerah 1.295,96 Ha dan Hargo Tirto memiliki luas daerah 1.471,73 Ha. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kokap yaitu seluas 6.150 Ha berada di dataran tinggi yaitu di ketinggian 101-500 m dari permukaan laut. Sehingga dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Kokap berupa daerah perbukitan.

Karena daerahnya yang sebagian besar adalah perbukitan maka mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani gula jawa yang biasa disebut penderes. Apabila dilihat dari profil Kecamatan Kokap tahun 2009,

sebagian besar penduduk di Kecamatan Kokap termasuk ke dalam golongan Keluarga Pra Sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 3**  
**Tabel Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Kokap**  
**Kabupaten Kulon Progo tahun 2009**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Keluarga Pra Sejahtera	5823
2.	Keluarga Sejahtera I	1905
3.	Keluarga Sejahtera II	1055
4.	Keluarga Sejahtera III	1198
5.	Keluarga Sejahtera Plus	221

*Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Kokap termasuk ke dalam golongan Keluarga Pra Sejahtera yaitu sebanyak 5.823 keluarga. Sedangkan sisanya 1.905 keluarga termasuk ke dalam golongan Keluarga Sejahtera I, 1.055 keluarga termasuk ke dalam golongan Keluarga Sejahtera II, 1.198 keluarga termasuk ke dalam golongan Keluarga Sejahtera III, dan 221 keluarga termasuk ke dalam golongan Keluarga Sejahtera Plus.

Dengan latar belakang sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Kokap yang berada pada golongan menengah ke bawah, maka dapat dipastikan bahwa untuk saat ini pendidikan terakhir sebagian besar masyarakatnya masih rendah. Tingkat pendidikan penduduk di wilayah Kecamatan Kokap pada tahun 2009, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 4**  
**Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kokap**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	2998
2.	Tidak tamat SD	3824
3.	Tamat SD	11173
4.	SMP	7050
5.	SMA	6511
6.	SMK	4058
7.	Pondok Pesantren	588
8.	Sarjana Muda	38
9.	Sarjana	266

*Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009*

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat adalah tamat SD yaitu sebanyak 11.173 penduduk. Sedangkan sisanya sebanyak 2.998 penduduk buta huruf, 3.824 penduduk tidak tamat SD, 7.050 penduduk tamat SMP, 6.511 penduduk tamat SMA Umum, 4058 penduduk tamat SMK, 588 penduduk tamat Pondok Pesantren, 38 penduduk tamat Sarjana Muda, dan 266 penduduk tamat Sarjana. Dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat tersebut maka adanya kebijakan BOS dianggap sangat membantu mereka dalam hal akses pendidikan.

Meskipun dengan latar belakang pendidikan rendah, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat berada pada golongan mekonomi menengah ke bawah serta sebagian besar wilayah Kecamatan Kokap yang berupa daerah perbukitan, akan tetapi prasarana pendidikan dalam hal ini jumlah sekolah dianggap cukup memadai untuk menampung anak-anak usia sekolah terutama untuk tingkat SMP. Jumlah prasarana pendidikan yang ada di tiap desa di Kecamatan Kokap dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 5**  
**Tabel Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kokap**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009**

No.	Desa	Jumlah Sekolah				
		TK	SD	SMP	SMA	PT
1.	Hargorejo	5	8	2	1	-
2.	Hargomulyo	5	9	1	-	-
3.	Kalirejo	5	8	1	-	-
4.	Hargowilis	5	8	1	-	-
5.	Hargotirto	4	9	1	-	-
	<b>Jumlah</b>	24	42	6	1	-

*Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009*

## **2. Implementasi Kebijakan BOS dan Putus Sekolah**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya putus sekolah dan sulitnya memperoleh akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat miskin sebagai dampak kenaikan BBM guna penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain.

Dana BOS bersumber dari APBN dan merupakan realisasi dari program kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Pendistribusian dana BOS tersebut disalurkan dengan cara didistribusikan kepada sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Nasional setempat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang



lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).

- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan (lihat Bab VI).
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

- h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
- m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- n. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Dalam implementasinya, kebijakan BOS dibagi ke dalam tiga bagian yaitu manajemen BOS, program BOS dan monitoring BOS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model mengenai proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Enam variable tersebut merupakan bagian dari tiga bagian implementasi kebijakan BOS, yaitu: manajemen BOS (komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta lingkungan ekonomi, social dan politik), program BOS (ukuran dan tujuan kebijakan serta sumber-sumber kebijakan), monitoring BOS (ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana dan sikap para pelaksana). Masing-masing variable tersebut saling mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan.

Sampai saat ini kebijakan BOS telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Akan tetapi tujuan utama dari kebijakan BOS dalam meminimalisir terjadinya putus sekolah khususnya angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap tergolong kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya perubahan yang berarti dari jumlah angka putus sekolah yang terjadi di wilayah Kecamatan Kokap selama adanya kebijakan BOS. Data implementasi kebijakan BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6.**  
**Proses Implementasi BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap**  
**Berdasarkan Manajemen, Program dan Monitoring BOS**

No	Klasifikasi BOS	Proses Implementasi BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap
1.	Manajemen BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim manajemen BOS dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu: tim manajemen BOS pusat, tim manajemen BOS propinsi, tim manajemen BOS kabupaten/kota, dan tim manajemen BOS sekolah;</li> <li>• Dalam implementasi BOS, sekolah mendapat sosialisasi langsung dari pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo minimal satu tahun sekali;</li> <li>• Dalam implementasi BOS, sekolah diwajibkan mengacu pada buku panduan BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;</li> <li>• Buku panduan BOS lengkap berisi tentang segala aturan untuk penggunaan dana BOS, mulai dari latar belakang BOS, tujuan, sasaran, waktu penyaluran dana, landasan hukum, jenis program BOS, organisasi pelaksana, mekanisme pelaksanaan, tata tertib pengelolaan dana, monitoring dan pelaporan serta pengawasan, pemeriksaan dan sanksi terkait implementasi BOS.</li> <li>• Untuk diimplementasikan di sekolah, aturan-</li> </ul>

		<p>aturan yang terdapat dalam buku panduan BOS dianggap kurang <i>fleksible</i> sehingga menimbulkan rekayasa penggunaan dana dalam laporan penggunaan dana BOS pada manajemen BOS di tingkat sekolah.</p>
2.	Program BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program BOS bertujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan akses pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu;</li> <li>• Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.</li> <li>• Secara keseluruhan program BOS sangat membantu masyarakat Kokap dalam meningkatkan akses pendidikan (peningkatan APK);</li> <li>• Dengan adanya BOS, kondisi sekolah menjadi lebih baik terutama dalam segi pembiayaan. Karena dana yang di dapat dari BOS lebih banyak dari sebelumnya meskipun sebenarnya dana BOS tersebut belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan sekolah secara keseluruhan;</li> <li>• Salah satu hal yang harus diperhatikan setiap pengelola pendidikan terkait dengan program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, adalah anak lulusan sekolah setingkat SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara;</li> <li>• BOS telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi jumlah angka putus sekolah di wilayah Kecamatan Kokap tidak mengalami penurunan;</li> </ul>
3.	Monitoring BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Propinsi, Tim Manajemen BOS Kab/Kota.</li> <li>• Setiap tiga bulan sekali sekolah di wilayah Kecamatan Kokap melaporkan penggunaan dana BOS langsung kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini disebut laporan tri wulan.</li> <li>• Selain itu, ada tim pemantau dana BOS yang datang langsung ke sekolah. Akan tetapi sekolah</li> </ul>

		<p>yang didatangi hanya <i>bersifat sample</i>. Hal ini dikarenakan jumlah tim pemantau dan jumlah sekolah yang tidak seimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam laporan penggunaan dana BOS terjadi rekayasa penggunaan dana. Hal ini dikarenakan kurangnya fleksibilitas aturan penggunaan dana BOS yang terdapat dalam buku panduan BOS.</li> <li>• Belum terlihat adanya sanksi yang jelas terhadap permasalahan rekayasa dana ini.</li> </ul>
--	--	--

*Dokumen: Diolah dari data observasi dan wawancara*

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi BOS di SMPN se-Kecamatan Kokap**

#### **a) Manajemen BOS**

Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat pusat dikelola oleh masing-masing direktorat. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMP bertanggung jawab terhadap program BOS untuk SMP/SMPLB/SMPT. Sedangkan pengelolaan program BOS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikelola oleh satu tim yaitu tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS kabupaten. Untuk tingkat sekolah disebut tim manajemen BOS tingkat sekolah yang ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

Dalam implementasinya, sebelumnya tim manajemen BOS tingkat sekolah mendapat sosialisasi program BOS dari pemerintah Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Sosialisasi ini dilakukan minimal satu tahun sekali, biasanya dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengundang kepek, bendahara dan wakil dari komite dari tiap-tiap sekolah penerima dana BOS. Kemudian dari pihak

sekolah disosialisasikan kepada masyarakat. Biasanya sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan pada setiap akhir semester ketika pembagian hasil belajar siswa atau raport dan ketika awal tahun ajaran baru.

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Bapak SY sebagai berikut:

“Program BOS itu pada mulanya disosialisasikan langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Minimal satu tahun sekali Dinas Pendidikan kabupaten Kulon Progo mengundang kepek, bendahara dan wakil komite dari tiap sekolah untuk mendapatkan sosialisasi kebijakan BOS maupun kebijakan-kebijakan yang lain mbak.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan dari Bapak SH sebagai berikut:

“Program BOS itu pada mulanya disosialisasikan langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dari sekolah baru disosialisasikan kepada masyarakat biasanya melalui rapat awal tahunan.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Ibu SR selaku warga masyarakat sebagai berikut:

“Ada pengumuman dari sekolah, dikasih tahu kalau sekolah gratis karena ada BOS waktu tahun ajaran baru itu atau pada waktu ngambil rapor anak. Biasanya kalau ada pengumuman dikasih tahu.” (Kamis, 8 Juli 2010)

Selain sosialisasi, sebagai pedoman dalam mengimplementasi BOS, sekolah juga mengacu pada buku panduan BOS yang dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Dalam implementasinya sekolah dituntut untuk menggunakan buku tersebut sebagai acuan dalam penggunaan dana BOS.

Ketika ditanya mengenai buku panduan tersebut, pihak sekolah mengakui bahwa mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti semua panduan yang ada di buku. Akan tetapi, hampir dari semua sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini mengakui bahwa panduan penggunaan dana BOS yang terdapat dalam buku tersebut dianggap terlalu kaku atau kurang fleksibel. Hal ini lah yang menyebabkan sering terjadinya rekayasa penggunaan dana dalam laporan penggunaan dana BOS. Rekayasa penggunaan dana tersebut diakui kurang baik tapi merupakan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan ada beberapa keperluan sekolah yang membutuhkan pengeluaran biaya akan tetapi hal tersebut tidak ada dalam salah satu ketentuan dalam buku panduan penggunaan dana BOS tersebut.

Rekayasa penggunaan dana sudah menjadi rahasia umum dan dianggap wajar. Hal ini dikarenakan sekolah yang menerima BOS tidak diperbolehkan untuk menarik biaya kepada masyarakat karena telah mendapat dana BOS. Sedangkan sekolah yang tidak mau menerima dana BOS juga tidak diperbolehkan untuk menarik biaya kepada masyarakat, akan tetapi harus mencari sumber dana lain selain BOS dan masyarakat. Tentunya bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran seperti daerah Kecamatan Kokap ini, dana BOS lah yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi sekolah untuk biaya operasional mereka. Oleh karena itu mereka menganggap rekayasa penggunaan dana sebagai suatu kewajiban karena dilakukan demi kepentingan sekolah. Mereka justru beranggapan bahwa yang terpenting bukanlah acuan



penggunaan dana yang bersifat baku akan tetapi monitoring dari pemerintah terhadap proses penggunaan dana BOS itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pengakuan bapak ST sebagai berikut:

“Kurang fleksible kalau dilihat dari buku panduan penggunaan BOS yang dari Dinas Pendidikan itu. Banyak keperluan sekolah yang membutuhkan biaya tapi tidak tertulis di dalam buku, akibatnya bukan rahasia umum lagi kalau terjadi rekayasa penggunaan dana dalam laporan penggunaan BOS. Maksudnya “rekayasa” untuk hal-hal yang positif lo mbak,hehe...” (Kamis, 8 Juli 2010)

Sama hal nya dengan pengakuan bapak SH sebagai berikut:

“Buku panduan penggunaan BOS yang dari Dinas Pendidikan itu, menurut saya kurang fleksible mbak. Misalnya, ada keperluan sekolah yang tidak tercantum dalam buku acuan penggunaan dana BOS. Sedangkan sekolah tidak diperbolehkan untuk meminta dana kepada masyarakat dalam bentuk iuran, sumbangan atau apapun. Sebenarnya yang terpenting itu adalah monitoringnya mbak bukan acuan yang berbentuk baku seperti itu. Solusinya ya mau tidak mau rekayasa penggunaan dana. Misalnya, sebenarnya buat benerin pintu tapi dalam laporan ditulis buat beli kertas. Ya mau gimana lagi mbak?.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan bapak SY sebagai berikut:

“Ya memang kurang fleksible mbak. Kadang ada pengeluaran sekolah yang membutuhkan dana tapi tidak tertulis dalam salah satu ketentuan yang ada dalam buku panduan penggunaan dana BOS dari dinas itu. Solusinya ya tetap menggunakan dana BOS. Apalagi untuk sekolah yang berada di daerah pinggiran seperti ini, siswanya sedikit, sedangkan besarnya dana BOS juga menyesuaikan dari jumlah siswa. Sekolah juga tidak memungut biaya dari masyarakat. Dananya kurang, penggunaannya juga diatur dengan ketat. Ada aturan-aturan baku seperti itu. (Sabtu, 26 Juni 2010)”

Diperkuat oleh pengakuan ibu EE sebagai berikut:

“Bukunya itu terlalu kaku mbak. Semuanya di atur di situ, padahal belum tentu sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya memiliki kebutuhan yang sama. Iya, kurang fleksible. Tapi sebisa

mungkin kami tetap mengacu pada buku panduan tersebut.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Dari pengakuan beberapa *stakeholder* pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, tim manajemen BOS telah terinci dengan baik. Di setiap tingkatan wilayah yaitu pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan sekolah, terdapat tim manajemen yang mengatur distribusi maupun implementasi dana BOS tersebut. Selain itu, terdapat buku panduan BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Buku tersebut lengkap berisi segala hal tentang BOS, mulai dari latar belakang BOS, tujuan, sasaran, waktu penyaluran dana, landasan hukum, jenis program BOS, organisasi pelaksana, mekanisme pelaksanaan, tata tertib pengelolaan dana, monitoring dan pelaporan serta pengawasan, pemeriksaan dan sanksi terkait implementasi BOS. Semuanya telah diatur secara rinci dalam buku panduan BOS tersebut.

Namun permasalahannya terletak pada kurang sesuainya aturan-aturan baku dalam penggunaan dana BOS yang terdapat dalam buku panduan BOS tersebut untuk diimplementasikan di lapangan. Karena aturannya yang bersifat baku, dianggap kurang fleksible bagi tiap-tiap sekolah yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda pada tiap sekolahnya sehingga menimbulkan terjadinya rekayasa penggunaan dana dalam laporannya.

## **b) Program BOS**

Secara keseluruhan adanya kebijakan BOS sangat membantu kemajuan pendidikan di Kecamatan Kokap. Setelah adanya kebijakan BOS pendidikan di Kecamatan Kokap semakin baik apabila dilihat dalam segi pembiayaan. Dana operasional yang dimiliki sekolah menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan BOS. Meskipun apabila dirinci, dana BOS tersebut belum cukup untuk biaya operasional sekolah secara keseluruhan. Selain itu, dengan dana BOS biaya operasional sekolah menjadi gratis sehingga membantu masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam hal akses pendidikan.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak ST sebagai berikut:

“Kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap secara keseluruhan pastinya lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya kebijakan BOS. Apalagi apabila dilihat dari kondisi masyarakat di wilayah kecamatan Kokap yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani gula jawa yang oleh warga sekitar biasa disebut dengan penderes, cenderung berada pada ekonomi tingkat menengah ke bawah. Biaya sekolah yang gratis, tentunya sangat membantu mereka dalam hal akses pendidikan” (Kamis, 8 Juli 2010).

Diperkuat oleh pengakuan Bapak SH sebagai berikut:

“Kalau terkait dengan pelayanan sekolah terhadap masyarakat dan peserta didik baik sebelum maupun setelah ada BOS itu sama saja baik karena kita dari pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekolah secara keseluruhan ya lebih baik setelah ada kebijakan BOS. Karena dana yang didapat sekolah jauh lebih besar daripada sebelum ada BOS. Walaupun apabila dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan sekolah yang harus di penuhi sebenarnya BOS itu masih kurang, tapi kalau dibandingkan

sebelum ada BOS, lebih banyak yang sekarang setelah ada BOS” (Sabtu, 5 Juni 2010).

Sama halnya dengan pengakuan Ibu SR sebagai berikut:

”Kalau menurut saya lebih baik ada dana BOS mbak. Ada BOS tentu saja sangat membantu mbak, uang yang tadinya buat bayar sekolah kan bisa digunakan untuk keperluan yang lain” (Kamis, 8 Juli 2010).

Namun demikian, meskipun BOS dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan pendidikan di daerah Kokap, tetap saja ada anggapan negative dari beberapa *stakeholder* pendidikan terkait adanya kebijakan BOS. BOS dianggap memanjakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke atas. Karena dengan adanya BOS, maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya operasional anak mereka di sekolah padahal mereka mampu.

Permasalahannya adalah dengan diberlakukannya kebijakan BOS, maka otomatis tidak ada alasan bagi sekolah penerima BOS untuk memungut dana kepada masyarakat karena sekolah telah dibiayai oleh pemerintah atau gratis. Sedangkan sekolah yang menolak BOS juga tidak diperbolehkan memungut biaya kepada masyarakat. Jadi sekolah harus mencari alternative lain untuk mendapatkan dana tanpa melibatkan dana dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman BOS bahwa sekolah yang menolak BOS dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Diperkuat lagi oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 2 dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sedangkan realitasnya, menurut beberapa pengakuan *stakeholder* pendidikan yang ada di Kecamatan Kokap, sebagian besar sekolah masih sangat membutuhkan dana bantuan dari masyarakat. Meskipun dengan adanya BOS, dana yang diterima sekolah untuk operasional mereka menjadi lebih besar dari sebelumnya akan tetapi belum mencukupi apabila dibandingkan dengan seluruh kebutuhan mereka.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak ST sebagai berikut:

“Setiap kebijakan itu pasti ada negatifnya mbak, tergantung banyak positifnya atau malah negatifnya? Kalau BOS itu khusus untuk di daerah Kokap ini lebih banyak positifnya. Kalau dikatakan memanjakan masyarakat, ya hanya untuk segelintir orang saja. Kalau secara keseluruhan jelas sangat membantu masyarakat untuk akses pendidikan” (Sabtu, 5 Juni 2010).

Sama halnya dengan pengakuan Bapak SH sebagai berikut:

”Dana BOS belum mencukupi apabila digunakan untuk biaya operasional sekolah secara keseluruhan. Sedangkan sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya kepada masyarakat dengan alasan apapun. Padahal jika diperbolehkan, tentunya sekolah masih sangat membutuhkan dana dari masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tergolong mampu. Yang jelas menurut saya BOS ini cukup membantu sekolah dalam segi pendanaan. Tapi ada juga dampak negatifnya mbak, apalagi kalau dikaitkan dengan masyarakat golongan atas. Bisa dikatakan memanjakan masyarakat juga. Daya juangnya jadi berkurang. Menganggap pendidikan sepele, tidak seperti dulu saya itu mau sekolah itu dengan penuh perjuangan dan semangat” (Sabtu, 5 Juni 2010).

Begitu juga dengan pengakuan Bapak SY sebagai berikut:

“Pada umumnya BOS itu membantu sekolah mbak, siswa tidak perlu bayar SPP. Tapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan sekolah secara keseluruhan jelas belum mencukupi. Sekolah juga tidak boleh memungut biaya tambahan kepada masyarakat. Kalau diperbolehkan tentu saja akan membantu pihak sekolah. Apalagi dengan sekolah yang siswanya tidak terlalu banyak seperti di sekolah ini. Dengan sarana dan prasarana belajar yang seadanya.

Tapi saya pribadi kurang setuju dengan BOS karena menurut saya BOS itu memanjakan masyarakat. Motivasi untuk sekolah jadi berkurang. Kan sudah dibiayai pemerintah jadi seenaknya, istilahnya seperti tidak terlalu menghargai. Tapi kalau secara umum ya membantu. Cuma itu tadi ada dampak negatifnya juga”. (Sabtu, 26 Juni 2010)

Dari pengakuan beberapa stakeholder pendidikan serta masyarakat di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan dana BOS masih sebatas hal-hal yang bersifat teknis saja. Secara teknis diartikan sebagai sarana untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah untuk meningkatkan akses pendidikan sehingga terjadi peningkatan APK dan tercapai program pemerataan pendidikan dalam rangka program Wajib Belajar 9 Tahun. Sedangkan apabila dikaji lebih dalam, tujuan BOS tidak hanya terkait dengan hal-hal teknis. Akan tetapi juga terkait dengan *meaning* dari adanya kebijakan BOS itu sendiri yaitu tidak hanya secara teknis untuk peningkatan akses tetapi juga untuk meningkatkan mutu dan manajemen sekolah (Buku Panduan BOS 2009).

Terkait dengan program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, salah satu hal yang harus diperhatikan setiap pengelola pendidikan adalah anak lulusan sekolah setingkat SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara mengalami putus sekolah ataupun tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara (Buku Panduan BOS 2009). Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus dibarengi dengan kualitas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut seperti, kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang kualitas proses pembelajaran.

Namun realitas di Kecamatan Kokap berkata lain, dari data yang telah didapat oleh peneliti diketahui masih banyak siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang SMP dan lebih banyak lagi anak usia sekolah jenjang SMP yang tidak bersekolah. Anak-anak yang mengalami putus sekolah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor biaya tetapi banyak faktor lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SH sebagai berikut:

“Terus terang mbak, saya itu kurang setuju kalau zaman sekarang anak putus sekolah kok karena tidak ada biaya. Wong bantuan dari pemerintah untuk anak sekolah itu banyak sekali. Ada BOS, ada juga berbagai macam beasiswa baik dari pemerintah ataupun pihak swasta. Kalau dilihat dari jumlah angka putus sekolah di sekolah ini, sebelum adanya BOS itu malah lebih sedikit mbak daripada setelah adanya BOS. Jadi mereka yang putus sekolah itu tidak selalu terkait dengan faktor biaya tetapi banyak faktor yang lain.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan dari Ibu EE sebagai berikut:

“Kalau di sekolah ini, masalah putus sekolah itu sebenarnya bukan semata-mata karena biaya kok mbak. Kalau Cuma masalah biaya kan sudah banyak bantuan. Banyak beasiswa baik dari pemerintah maupun pihak swasta mbak.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Bapak SY sebagai berikut:

“Permasalahan putus sekolah itu sebenarnya bukan semata-mata karena biaya kok mbak. Kalau masalah biaya kan sudah banyak bantuan, ada bantuan orang miskin, PKH, macem-macem pokoknya banyak beasiswa juga. Sekolah di sini itu cuma mengeluarkan uang untuk beli seragam Rp 275.000,00. Les-les di luar jam sekolah itu juga gratis.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Diperkuat oleh pengakuan Bapak SN sebagai berikut:

“Di sini itu mbak, anak mau sekolah dengan tertib itu sudah syukur Alhamdulillah. Walaupun biaya sudah gratis, tapi emang dasar

anaknya bandel, nakal, susah untuk diatur. Jadi persoalannya itu tidak hanya dari segi biaya, tapi banyak faktor lain. Di sini guru-guru juga banyak yang pindah karena tidak tahan dengan anak-anaknya.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggap berkualitas karena latar belakang pendidikannya serta usia yang masih muda justru mengajukan mutasi dari salah satu SMP N yang ada di Kecamatan ini. Alasannya adalah kondisi geografis yang kurang mendukung, letak sekolah yang cukup jauh, tidak adanya sarana transportasi yang memadai, serta kelakuan anak yang indiscipliner.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak SN sebagai berikut:

“Ya kalau untuk akses pendidikan tapi kalau mutu saya rasa belum mbak. Mutu itu kan terkait beberapa faktor mbak. Sarana prasarana, kualitas guru, kualitas siswa juga. Di sini, guru-guru muda yang kayaknya berkualitas itu malah pada minta pindah ko mbak. Karena kondisi geografis perbukitan, sarana transportasi umum juga tidak ada, sarana prasarana pendidikan juga sangat kurang, mbak sudah lihat sendiri to? Anak-anaknya juga bandel-bandel. Gurunya jadi tambah tidak betah. Kalau sudah tidak betah mau gimana lagi mbak?” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan Bapak SH sebagai berikut:

“BOS itu cukup efektif mbak kalau dilihat dari APK. Sekarang kan anak itu tidak perlu bayar uang SPP lagi. Paling-paling Cuma membayar uang seragam ketika awal masuk sekolah. tapi kalau dilihat dari mutu ya mbaknya tahu sendiri kan jawabannya? Mutu itu terkait dengan banyak faktor. Faktor-faktor yang lain saja kurang mendukung. Contohnya saja, sarana transportasi kurang memadai, sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran juga kurang.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Bapak ST sebagai berikut:

“Sudah kalau dilihat dari APK nya. Kalau dari mutu jelas belum. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Kalau faktor-faktor yang lain belum baik ya jelas mutu juga belum bisa baik kan mbak? Faktor sarana transportasi, kondisi geografis, kualitas guru,



sarana belajar mengajar dan lain-lain itu juga belum baik.” (Kamis, 8 Juli 2010)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program BOS sangat membantu masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan akses pendidikan di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian, tidak berdampak langsung pada penurunan jumlah angka putus sekolah maupun peningkatan mutu pendidikan di wilayah ini. Hal ini dikarenakan faktor biaya bukanlah penyebab satu-satunya anak mengalami putus sekolah. Dan biaya bukanlah satu-satunya yang menjadi poin penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi banyak faktor lain yang turut serta menjadi penyebabnya.

### **c) Monitoring BOS**

Implementasi BOS di SMPN se-Kecamatan Kokap tergolong baik karena dalam penggunaannya sekolah berusaha berpedoman pada buku panduan BOS yang secara resmi dikeluarkan oleh Dirjen Mendikdasmen dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di dalam buku tersebut, terdapat aturan setiap tiga bulan sekali, sekolah yang menerima dana BOS berkewajiban untuk memberikan laporan secara langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo terkait penggunaan dana BOS. Laporan ini biasa disebut dengan laporan triwulan. Selain laporan triwulan juga terdapat laporan akhir tahun. Disamping laporan yang dilakukan secara rutin oleh sekolah, monitoring BOS juga dilakukan dengan cara adanya pengawasan program BOS meliputi,

pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat. (Buku Panduan BOS 2009)

Selain itu, ada tim pemantau dana BOS dari Dinas Kabupaten Kulon Progo maupun dari Dinas Propinsi DIY yang secara langsung datang ke sekolah untuk melihat dan memeriksa laporan penggunaan dana BOS. Akan tetapi karena jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah tim pengawas penggunaan dana BOS maka sekolah yang didatangi pun hanya bersifat *sample*. Walaupun waktunya tidak selalu pasti, tim tersebut pasti datang untuk memantau sekolah.

Hal ini sesuai dengan pengakuan bapak SH sebagai berikut:

“Ada laporan secara langsung kepada pihak dinas pendidikan Kabupaten Kulon Progo terkait penggunaan dana BOS yang dilakukan setiap tiga bulan sekali mbak. Selain itu juga ada tim pengawas dana BOS dari kabupaten maupun propinsi yang datang langsung ke sekolah tapi sekolahnya itu hanya bersifat *sample*. Nggak mungkin to mbak, dengan jumlah tim pengawas yang hanya beberapa orang mendatangi semua sekolah yang ada karena jumlah mereka tidak sebanding. Jadi, yang rutin itu ya laporan tri wulan itu. Selain itu juga ada pengawasan dari Bawasda Propinsi dan kabupaten, BPKP, BPK, dan lain-lain. Di buku panduan BOS itu ada aturannya mbak.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Sama hal nya dengan pengakuan Bapak ST sebagai berikut:

“Laporan rutin dari setiap sekolah penerima BOS itu setiap tiga bulan sekali yang disebut sebagai laporan triwulan. Laporan penggunaan dana langsung kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga ada laporan akhir tahun. Ada juga pengawasan dari Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (BAWESDA) Propinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“ (Kamis, 8 Juli 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Ibu EE sebagai berikut:

“Pengawasannya banyak mbak. Tapi yang rutin itu laporan penggunaan BOS setiap tiga bulan sekali yang disebut laporan triwulan. Laporan akhir tahun juga ada. Pengawasan-pengawasan dari BPK, BAWESDA, dan lain-lain seperti yang di buku itu juga ada. Tim pemantau manajemen BOS juga terkadang ada yang datang langsung ke sekolah tapi waktunya tidak tentu mbak.”  
(Sabtu, 26 Juni 2010)

Namun demikian, ketika ditanya “Bagaimana dengan kasus rekayasa dana yang selama ini sering terjadi dalam laporan penggunaan dana BOS?” Pihak sekolah tetap beranggapan hal ini dikarenakan kurang fleksibelnya ketentuan penggunaan dana yang tertuang dalam buku panduan BOS. Petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS. Maka solusinya, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, sekolah terpaksa melakukan rekayasa dalam laporan penggunaan dana. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan sekolah. Jadi, rekayasa dana dianggap bukan merupakan hal yang baik tetapi merupakan solusi terbaik yang bisa diambil oleh sekolah untuk kelancaran operasional mereka.

Hal ini diperkuat dengan hasil audit BPK pada tahun ajaran 2007/2008 juga mengindikasikan terjadinya korupsi sebanyak 62,84% sekolah yang disampling yaitu sebanyak 4127 sekolah dari 200.000 sekolah SD/SMP di 62 kabupaten/kota tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS. Selain itu, dana BOS sebesar RP 28,14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Seperti yang diakui oleh Bapak SH dan Bapak ST sebagai berikut:

Bapak SH menyatakan bahwa:

“Kalau tidak direkayasa mau memakai uang darimana mbak? Sekolah kan tidak boleh meminta biaya tambahan dari masyarakat? Jadi solusinya ya tetap memakai uang BOS tetapi dalam laporan ditulis untuk hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku panduannya.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Ditunjang oleh pengakuan Bapak ST sebagai berikut:

“Iya mbak, saya beranggapan juga kurang fleksible. Biasanya solusinya ya seperti itu, sekolah terpaksa melakukan rekayasa penggunaan dana dalam laporan penggunaan dana BOS. Kalau dilihat dari kata “rekayasa” ya jelas tidak baik mbak... Tetapi kan dilihat dulu lebih baiknya seperti apa? Kalau solusi yang terbaik memang harus menggunakan dana dari BOS karena tidak ada dana yang lain, maka mau tidak mau ya harus dilakukan untuk kelancaran operasional mereka...” (Kamis, 8 Juli 2010)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring pelaksanaan program BOS kurang dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang sesuainya aturan-aturan tertulis yang terdapat dalam buku acuan penggunaan dana BOS dengan kebutuhan realitas di lapangan. Sehingga berdampak pada timbulnya rekayasa penggunaan dana.

## **2. Problematika Kebijakan BOS dan Angka Putus Sekolah**

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa BOS sangat berperan dalam membantu masyarakat dalam akses pendidikan terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun demikian, hal tersebut tidak berdampak langsung terhadap penurunan jumlah angka putus sekolah. Hal ini dikarenakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh

berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Begitu juga dengan terjadinya putus sekolah terkait dengan beberapa faktor yang tentunya akan berbeda pada tiap sekolahnya.

Kecamatan Kokap memiliki tiga buah SMP yang berstatus Negeri yaitu SMP N 1 Kokap, SMP N 2 Kokap dan SMP N 3 Kokap. Masing-masing sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda seperti kondisi geografis, sarana transportasi, lingkungan masyarakat, sarana prasarana untuk proses pembelajaran, input siswa, serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berbeda sehingga problem putus sekolah yang terjadi di masing-masing sekolah pun memiliki faktor yang sedikit berbeda.

SMP N 1 Kokap terletak di desa Hargorejo. Letak sekolah ini cukup strategis karena daerah Hargorejo bisa dikatakan merupakan pusat kota Kecamatan Kokap. Sarana transportasi mudah ditemui, sarana prasarana untuk proses pembelajaran cukup memadai, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tergolong baik, input siswa cukup baik karena SMP N 1 Kokap merupakan sekolah yang cukup favorit di kecamatan ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah di SMP N 1 Kokap ini diantaranya adalah dampak dari kemajuan IPTEK, anak bekerja, dampak dari pengaruh gaya hidup yang konsumtif dan hedonis, kurangnya perhatian orang tua dalam bidang pendidikan serta adanya kenakalan remaja berupa gangguan dari teman sebaya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu EE sebagai berikut:

“Banyak factor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah, mulai dari malas belajar. Terus ada juga yang lebih memilih untuk bekerja. Karena latar belakang perekonomian keluarga juga kurang lalu si anak sudah bisa menghasilkan uang sendiri jadi lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah. Selain itu juga ada yang lebih memilih untuk menonton acara kesayangannya di televisi. Ketika ditanya alasannya tidak masuk sekolah karena ada acara favorit si anak di waktu jam belajar sekolah. Ada juga yang mengikuti orang tuanya untuk bertransmigrasi mbak. Kebanyakan karena mengikuti orang tuannya bertransmigrasi itu. Tidak ada laporan kalau mau pindah sekolah jadi ya statusnya menjadi anak yang putus sekolah. Akan tetapi secara keseluruhan, BOS itu sangat membantu mbak terutama untuk siswa yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah tetapi memiliki motivasi belajar tinggi. Animo masyarakat juga tinggi dalam menyambut kebijakan BOS ini.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Ditambah oleh pengakuan dari Ibu SR sebagai berikut:

“Kalau anak saya itu, si DK, ketika ditanya ngakunya kondisi medan mbak. Kondisi jalannya itu yang sulit dan jarak sekolah yang cukup jauh. Tapi walaupun tidak sekolah, di rumah dia sering belajar sendiri, membaca buku-buku pelajarannya. Makanya, saya tidak yakin hanya gara-gara itu dia tidak mau sekolah. Soalnya dari dulu DK itu suka dijahilin temen-temennya. Dulu TK, uang jajannya setiap hari diambil temannya. Waktu SD, dia juga dikerjain teman-teman sekelasnya, sampai biru-biru badannya. Dika itu anaknya pendiam mbak, ngalahan. Kalau ditanya, tidak mau ngomong. Sampai-sampai saya datang langsung ke sekolahnya dulu. Ternyata benar, anak saya itu dikerjain teman-temannya. Saya sedih kalau melihat anak saya tidak sekolah. Padahal dia itu termasuk anak yang cukup berprestasi di kelas. Waktu guru BP dan bapak Kepala Sekolah datang kesini, dia malah lari kayak ketakutan begitu”. (Kamis, 8 Juli 2010)

Sedangkan SMP N 2 Kokap terletak di desa Hargetirto. Lokasi sekolah ini cukup strategis, suasana di sekitar lingkungan sekolah yang terlihat sangat ramah lingkungan cukup nyaman apabila digunakan untuk belajar. Sarana prasarana untuk proses pembelajaran cukup memadai serta input siswa juga

cukup. Akan tetapi sarana transportasi agak sulit untuk ditemui. Karena sarana transportasi tersebut hanya beroperasi di pagi hari ketika jam anak berangkat ke sekolah dan siang hari ketika jam anak untuk pulang sekolah. Selain itu, akan sulit sekali menemukan sarana transportasi umum di daerah itu.

Faktor lainnya dikarenakan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya urusan administrasi surat-surat yang dibutuhkan oleh siswa apabila ingin pindah sekolah. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya putus sekolah di sekolah ini diantaranya, perilaku indisipliner anak, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, serta pengaruh gaya hidup yang konsumtif dan hedonis.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SH sebagai berikut:

“Terjadinya putus sekolah itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tapi saya tidak setuju, kalau ada anak yang tidak sekolah karena faktor biaya operasional di sekolah. Tapi kalau dikaitkan dengan biaya, kemungkinan besar biaya operasional anak itu sendiri untuk menuju ke sekolah. Selain itu juga factor gaya hidup, temennya punya hp pengen hp. Jarak sekolah jauh, karena minimnya sarana transportasi umum minta sepeda motor, dan lain-lain. Apalagi dengan perekonomian yang rata-rata kurang, tentu tidak sanggup menuruti permintaan anak kalau untuk gaya hidup seperti itu. Disamping itu, latar belakang pendidikan orang tua rendah sehingga kurang memperhatikan perkembangan anak. Tapi yang memang dasarnya malas belajar juga ada. Meskipun begitu, tetap saja BOS itu sangat membantu masyarakat. Lebih banyak positifnya daripada negatifnya.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Ditambah lagi oleh pengakuan Ibu SI sebagai berikut:

“Penyebab putus sekolah di sini itu banyak mbak. Tapi yang paling banyak itu gara-gara ikut orang tuanya transmigrasi. Mungkin karena kurangnya pemahaman orang tua tentang arti pentingnya urusan administrasi untuk pindah sekolah ya mbak.... Latar belakang orang tua rendah sehingga tidak tahu kalau harus mengurus surat-surat

untuk pindah sekolah. Padahal untuk saat ini, apabila anak akan pindah sekolah maka harus mendapat surat rekomendasi pindah sekolah dari sekolah yang diinggalkan bukan sekolah yang dituju. Sehingga, kalau anak tersebut tidak mempunyai surat itu, maka perpindahan sekolahnya pun juga akan sulit. Bahkan sekolah lain juga tidak akan menerima anak tersebut.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Lain halnya dengan SMP N 3 Kokap yang terletak di desa Kalirejo. Kondisi geografis di daerah ini sulit dijangkau karena terletak di atas bukit. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sarana transportasi umum yang melintasi daerah ini. Sarana prasarana proses pembelajaran yang kurang memadai serta input siswa yang kurang berkualitas. Faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah diantaranya faktor teknis karena sekolah sulit untuk dijangkau, selain itu motivasi belajar siswa kurang, lemahnya daya pikir anak, adanya keinginan anak untuk berumah tangga, perilaku indisipliner, kurangnya perhatian orang tua dalam bidang pendidikan.

Hal ini sesuai dari pengakuan Bapak MS sebagai berikut:

“Di sini itu mbak, anak mau sekolah dengan tertib itu sudah syukur Alhamdulillah. Walaupun biaya sudah gratis, tapi emang dasar anaknya bandel, nakal, susah untuk diatur. Di sini guru-guru juga banyak yang pindah karena tidak tahan dengan anak-anaknya. Contohnya mbak, ada anak yang disuruh potong rambut oleh bapak Kepsek nya. Karena tidak dihiraukan, akhirnya disuruh ke kantor dan rambutnya dipotong oleh bapak Kepsek sendiri. Eh, besoknya tidak masuk sekolah sampai seminggu. Sampai-sampai guru BK datang ke rumah, baru anak tersebut mau masuk sekolah lagi. Ada juga yang putus sekolah karena mau menikah mbak. Bukan pernikahan dini lo soalnya usia anak juga sudah cukup matang. Memang sebelumnya daya pikirnya lemah, jadi banyak tidak naik kelasnya”. (Sabtu, 26 Juni 2010)

Senada dengan pengakuan Bapak SN sebagai berikut:

“Betul itu mbak, anak di sini itu bandel-bandel. Waktu perjalanan pulang dari sekolah, saya pernah bertemu dengan anak SMP sini. Di



depan saya itu yo srawung sambil menundukkan kepala itu, tapi setelah saya jalan, klotak! Eh, dilempari batu! Mungkin penyebabnya ya kurang pengawasan dari orang tua. Orang tua yang pendidikannya kurang, tidak tahu bagaimana harus bersikap, jadi ya anaknya seperti itu. Alat transportasi juga kurang bahkan untuk sampai ke sekolah ini itu tidak ada kendaraan umum sama sekali. Kalau naik kendaraan umum harus berjalan kaki lagi sejauh kurang lebih 2 Km. Tahu sendiri, medannya juga perbukitan seperti itu. Bahkan tidak hanya anak yang putus sekolah mbak, guru-guru yang masih muda-muda itu juga banyak yang pindah ko karena tidak tahan dengan sikap anaknya, tidak tahan dengan medan yang harus dilalui juga. Untuk anak-anak yang punya motivasi tinggi untuk bersekolah, tentunya BOS ini sangat membantu mereka.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Setelah mendengar beberapa pengakuan dari stakeholder pendidikan sebagai narasumber dalam penelitian ini diketahui bahwa factor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kecamatan Kokap ini bukanlah satu-satunya factor biaya, tetapi banyak factor lain. Dari berbagai macam factor seperti tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua macam faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar anak.

Faktor internal diantaranya tidak adanya keinginan atau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri untuk melanjutkan sekolahnya, perilaku indiscipliner, dan anak telah menghasilkan uang sendiri atau bekerja. Sedangkan faktor eksternal diantaranya latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua, kondisi geografis daerah, dampak kemajuan IPTEK, transmigrasi serta kekerasan di sekolah baik secara fisik maupun psikis terutama yang berasal dari gangguan teman sebaya.

Dari paparan di atas, maka faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di masing-masing SMP N yang ada di Kecamatan Kokap dapat di kategorisasikan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
**Tabel Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah**

No	Nama Sekolah	Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah	
		Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	SMP N 1 Kokap	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Rendahnya motivasi belajar anak,</li> <li>⦿ Anak lebih memilih untuk bekerja,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Proses administrasi perpindahan sekolah anak yang tidak diurus,</li> <li>⦿ Transmigrasi,</li> <li>⦿ Latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua rendah,</li> <li>⦿ Dampak kemajuan IPTEK,</li> <li>⦿ Kekerasan teman sebaya,</li> <li>⦿ Pengaruh gaya hidup konsumtif dan hedonis.</li> </ul>
2.	SMP N 2 Kokap	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Rendahnya motivasi belajar anak,</li> <li>⦿ Lemahnya daya pikir anak,</li> <li>⦿ Perilaku indisipliner anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Proses administrasi perpindahan sekolah anak yang tidak diurus,</li> <li>⦿ Transmigrasi,</li> <li>⦿ Jauh dari orang tua,</li> <li>⦿ Latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua rendah,</li> <li>⦿ Pengaruh gaya hidup konsumtif dan hedonis,</li> <li>⦿ Sarana transportasi kurang.</li> </ul>
3.	SMP N 3 Kokap	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Rendahnya motivasi belajar anak,</li> <li>⦿ Lemahnya daya pikir anak,</li> <li>⦿ Perilaku indisipliner anak,</li> <li>⦿ Menikah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⦿ Proses administrasi perpindahan sekolah anak yang tidak diurus,</li> <li>⦿ Kondisi geografis daerah yang sulit,</li> <li>⦿ Sarana transportasi kurang,</li> <li>⦿ Latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua rendah,</li> <li>⦿ Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas,</li> <li>⦿ Kurangnya sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran.</li> </ul>

*Dokumen: Diolah dari data observasi dan wawancara*

### **3. Faktor Pendukung Implementasi BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap**

Di antara faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya putus sekolah tersebut, ada faktor yang mendukung tujuan implementasi BOS dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah, diantaranya:

a. Latar belakang ekonomi orang tua

Latar belakang ekonomi orang tua di Kecamatan Kokap yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai penderes berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan kondisi demikian, dana BOS sangat membantu mereka dalam mengakses pendidikan. Tentunya hal ini menjadi faktor pendukung untuk mencapai tujuan kebijakan dana BOS dalam meminimalisir jumlah angka putus sekolah sehingga tercapai pemerataan pendidikan.

b. Motivasi belajar siswa

Motivasi belajar siswa yang tinggi juga memberikan kontribusi yang baik bagi implementasi BOS dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah.

c. Sosialisasi BOS secara intens kepada masyarakat dari pemerintah dan sekolah

Peran aktif pemerintah dan sekolah dalam sosialisasi setiap kebijakan yang ada kepada masyarakat tentunya sangat bermanfaat guna pencapaian tujuan secara optimal. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan

melalui pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi maupun secara legal formal.

d. Animo masyarakat yang tinggi

Animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut baik adanya kebijakan dana BOS tentunya menjadi faktor pendukung berjalannya implementasi BOS dengan baik.

#### **4. Faktor Penghambat Implementasi BOS Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap**

Di daerah Kecamatan Kokap, putus sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor. BOS merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah guna meminimalisir jumlah angka putus sekolah. Dana BOS berupa sejumlah dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang digunakan untuk keperluan operasional sekolah. Sehingga bisa meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat dari golongan menengah ke bawah dalam mengakses pendidikan. Namun realitas di lapangan menjelaskan bahwa faktor biaya bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Terdapat berbagai macam faktor lain. Apabila faktor-faktor lain ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah maka akan menjadi penghambat tujuan implementasi BOS dalam meminimalisir jumlah angka putus sekolah. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

a. Transmigrasi

Transmigrasi juga menjadi salah satu factor yang menyebabkan terjadinya angka putus sekolah di Kecamatan Kokap ini. Banyak anak yang mengikuti orang tuanya bertransmigrasi ke luar daerah. Karena latar belakang pendidikan orang tuanya yang kurang, permasalahan administrasi untuk syarat pindah sekolah pun sering tidak diurus. Akibatnya terjadi kesulitan bagi anak ketika akan pindah sekolah ke daerah lain. Karena saat ini, apabila ingin pindah sekolah, maka harus ada surat izin dari pihak sekolah yang ditinggalkan. Selain itu, tidak tertibnya administrasi juga memberikan dampak pada sulitnya pendataan jumlah anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah di daerah tersebut.

Faktor ini menjadi penyumbang terbesar yang menyebabkan siswa mengalami putus sekolah di daerah Kecamatan Kokap. Dalam hal ini, sekolah dituntut untuk memberikan perannya. Sosialisasi dari pihak sekolah kepada masyarakat tentang pentingnya permasalahan administrasi untuk kepentingan pindah sekolah sangatlah dibutuhkan.

b. Kondisi geografis daerah

Kendala teknis seperti kondisi geografis daerah yang sulit, sarana transportasi kurang memadai serta jarak sekolah yang cukup jauh akan memakan biaya yang cukup besar bagi siswa tersebut untuk melanjutkan sekolahnya. Meskipun biaya operasional di sekolah dinyatakan gratis akan tetapi dengan kondisi yang seperti itu, maka dapat dipastikan biaya operasional siswa itu sendiri untuk menuju ke sekolah setiap harinya

cukup besar. Untuk siswa dengan latar belakang perekonomian orang tuanya yang kurang, maka kondisi seperti ini tentunya cukup memberatkan bagi mereka.

Dampak negative lain dari kondisi geografis daerah yang sulit ini adalah tidak sedikitnya tenaga pendidik yang dianggap berkualitas meminta untuk mutasi karena tidak tahan dengan kondisi yang ada.

c. Anak telah menghasilkan uang sendiri atau bekerja

Anak yang telah bisa menghasilkan uang sendiri biasana akan berpikir bahwa pendidikan tidak penting. Yang penting bisa menghasilkan uang. Motivasinya akan berubah menjadi motivasi untuk bekerja menghasilkan uang bukan lagi motivasi untuk belajar. Hal ini juga bisa menyebabkan anak bergaya hidup konsumtif dan hedonis. Selain itu, anak yang bekerja juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian keluarga yang kurang sehingga menyebabkan anak turut serta menjadi tulang punggung keluarga.

d. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran

Sekolah merupakan sarana bagi anak untuk mengembangkan potensi mereka. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran akan mempengaruhi minat belajar anak. Anak menjadi bosan karena tidak adanya variasi dalam proses pembelajaran karena tidak didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai. Tersedianya ruang perpustakaan yang baik, ruang laboratorium dan ruang

komputer yang memadai tentunya akan lebih menumbuhkan minat anak dalam belajar.

e. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas

Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dapat berdampak pada kurangnya motivasi belajar siswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sangat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan IQ saja tetapi juga kecerdasan emosional. Selain itu, hendaknya setiap pendidik dan tenaga kependidikan ataupun calon pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggap berkualitas tidak hanya mengejar status PNS, tetapi juga bersedia untuk ditempatkan di mana saja sehingga tidak hanya menumpuk di daerah perkotaan. Apalagi dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Dengan demikian, ada harapan bagi daerah-daerah terpencil untuk mengejar ketertinggalan mereka.

f. Tidak adanya keinginan atau motivasi dari dalam diri siswa untuk melanjutkan sekolah.

Tidak adanya motivasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya malas belajar dan lemahnya daya pikir anak. Anak yang malas belajar dan memiliki daya pikir lemah cenderung lambat dalam mengikuti pelajaran yang berlangsung di sekolah. Sehingga anak tersebut beberapa kali tidak naik kelas. Karena beberapa kali tidak naik kelas maka usianya pun berbeda dengan usia teman-teman sekelasnya. Hal ini

akan menimbulkan berbagai dampak seperti timbulnya rasa malu untuk bergaul dengan teman-temannya atau sebaliknya anak akan menjadi nakal karena merasa dirinya yang paling besar diantara teman-temannya. Biasanya setelah mengalami hal ini anak akan malas untuk belajar dan akhirnya mengalami putus sekolah. Bahkan ada anak yang memilih untuk membina rumah tangga daripada melanjutkan sekolahnya karena umurnya yang tergolong sudah cukup matang.

g. Perilaku Indisipliner

Perilaku yang indisipliner tentunya tidak sesuai dengan lingkungan di sekolah yang penuh dengan tata tertib. Anak yang berperilaku indisipliner biasana selalu melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah. Perilaku indisipliner biasanya terkait dengan pengawasan orang tua. Sebagian anak yang berperilaku indisipliner berada jauh dari orang tua. Orang tua berada di luar daerah bahkan berada di luar negeri menjadi TKI. Segala kebutuhan anak tercukupi, akan tetapi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, maka anak pun berperilaku seenaknya.

Perilaku anak yang indisipliner di daerah ini bahkan menyebabkan tenaga pendidik memilih untuk mutasi karena merasa tidak sanggup mendidik anak-anak tersebut.

h. Latar belakang pendidikan orang tua

Latar belakang pendidikan orang tua yang tergolong rendah, mempengaruhi pandangan sosiokultural mereka sehingga kurang memperhatikan pendidikan sang anak. Peran aktif pemerintah dan



sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan yang ada sangat membantu dalam merubah *mindset* mereka dalam memandang arti pendidikan.

i. Dampak kemajuan IPTEK

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, berbagai media informasi mudah diakses masyarakat hingga di daerah pelosok sekalipun, seperti media televisi, radio, bahkan internet. Tanpa disadari, salah satu dampak yang ditimbulkan dari media informasi tersebut adalah fenomena pengaruh gaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Bagi anak-anak yang sudah terbiasa memegang uang dalam arti menghasilkan pendapatan sendiri, maka mereka bisa mencukupi kebutuhan untuk gaya hidup mereka sendiri dan akan berpendapat bahwa pendidikan itu tidak penting dan akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya.

Selain itu, berbagai macam acara hiburan menarik yang disuguhkan oleh berbagai macam stasiun televisi juga mempengaruhi pendidikan anak. Ada kasus putus sekolah yang saya temui di Kecamatan Kokap ini juga disebabkan karena adanya acara favorit si anak ketika jam sekolah. Anak tersebut lebih memilih meninggalkan sekolahnya daripada meninggalkan hobi menonton acara kesayangannya di televisi tersebut.

j. Gangguan teman sebaya

Faktor dari gangguan teman sebaya ini jarang ditemui tetapi ada. Sikap teman-teman di sekolahnya yang suka mengganggu dapat menjadi salah satu faktor penyebab siswa putus sekolah. Bentuk gangguan tersebut dapat berupa ejekan, pemerasan, bahkan kekerasan secara fisik. Hal ini

tentu saja mempengaruhi perkembangan siswa baik secara psikologis maupun jasmani. Di sini peran guru dalam *monitoring and controlling* kondisi siswa sangatlah penting.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi terjadinya angka putus sekolah, berbagai macam cara telah diusahakan oleh pihak sekolah, diantaranya melakukan pendekatan langsung secara personal kepada siswa. Apabila pendekatan tersebut dianggap tidak berhasil, maka sekolah akan mendatangi rumah anak dan membicarakan permasalahan tersebut dengan orang tua dan bersama-sama mencari solusinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah (Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)” di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap sangat membantu masyarakat di Kecamatan Kokap karena latar belakang sebagian besar masyarakatnya berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi terdapat problematika kebijakan BOS yang dikarenakan belum maksimalnya peran BOS untuk meminimalisir jumlah angka putus sekolah. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal di luar kebijakan BOS yang kuat sehingga tidak memberi dampak terhadap penurunan angka putus sekolah.

Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya motivasi belajar anak, perilaku indisipliner anak, anak bekerja, latar belakang pendidikan orang tua, kondisi geografis daerah yang sulit, dampak kemajuan IPTEK, transmigrasi, adanya gangguan teman sebaya, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran serta kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh, maka pada kesempatan ini peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkompeten sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
  - a. Menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau, khususnya menyediakan sarana transportasi yang memadai.
  - b. Menyediakan tenaga pengajar yang siap untuk terjun dan bisa ditempatkan di mana saja (bukan hanya mengejar status PNS yang kemudian numpuk di daerah perkotaan).
  - c. Meningkatkan monitoring terhadap penggunaan dana BOS.
  - d. Sosialisasi atau penyadaran secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Merubah pola pikir yang menganggap enteng pendidikan.
  - b. Turut serta membantu pemerintah dalam meminimalisir terjadinya putus sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak membiarkan anak mengalami putus sekolah.
3. Bagi sekolah
  - a. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS sehingga meminimalisir indikasi terjadinya korupsi.

- b. Membantu pemerintah dalam sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dan berbagai macam maksud dan tujuan dari suatu kebijakan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi V. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Dirjen Mendikdasmen. 2009. *Buku Panduan BOS Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu 2009*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sukardi, dkk. 2007. *Laporan Hasil Penelitian "Evakuasi Efikasi Pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tilaar dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Bandung: Citra Umbara.

- 2004. Undang-undang Dasar 1945. Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Ade Makmur. 2008. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional: Meretas Jalan Mencipta Masa Depan*. <http://buktipadjaran69.wordpress.com>
- Administrator. 2007. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Sosialisasi Program BOS dan Perangkat Pengawasannya*. <http://itjen.depdiknas.go.id>
- Alif Ichwan. 2008. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Anggaran Pendidikan 20% Dipenuhi*. <http://www.kompas.com>
- Bambang Supriyadi. 2009. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal*. <http://images.soemarno.multiply.com>
- Iyank. 2006. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Desentralisasi Pendidikan*. <http://one.idoskripsi.com>
- Kamalfuadi. 2007. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Desentralisasi Pendidikan dan Kewenangan Sekolah*. <http://fuadinotkamal.wordpress.com>
- Pakde Sofa. 2009. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan*. <http://massofa.wordpress.com>
- Pers Depdiknas. 2008. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Terobosan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun*. <http://itjen.diknas.go.id>
- Palupi Panca A. 2009. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Putus Sekolah Masih menjadi Masalah*. <http://www.menegpp.go.id>
- Sumanto. 2009. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Gresik*. <http://mkpd.wordpress.com>

Suyanto. 2009. diakses pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. *Bantuan Operasional Sekolah*. <http://dinpendik.rembangkab.go.id>



# **LAMPIRAN**